

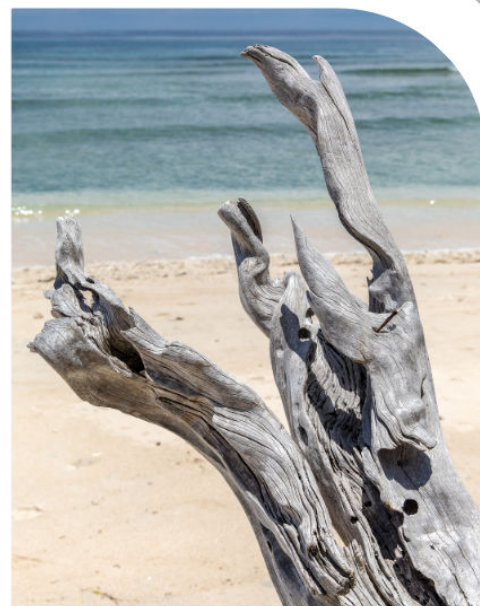
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN LOMBOK UTARA

MENURUT PENGELUARAN

TAHUN

**2019-
2023**

Volume 8, 2024



Katalog: 9302020.5208

ISSN:

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN LOMBOK UTARA
TAHUN 2019-2023**

Volume 8, 2024



*BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LOMBOK UTARA*

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN LOMBOK UTARA
MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2019-2023**

Volume 8, 2024

ISSN:

Nomor Publikasi: 52080.1901

Katalog BPS : 9302020.5208

Ukuran Buku: 21,5 cm x 29,7 cm

Jumlah halaman: viii+ 62 halaman

Naskah:

Tim Penyusun Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Utara

Diterbitkan Oleh:

©Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Utara

Gambar ilustrasi: Canva Free Picture

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/
atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan
komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten
Lombok Utara**

TIM PENYUSUN
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN LOMBOK UTARA
MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2019-2023
Volume 8 , 2024

Penanggungjawab Umum:
Isa, SE.,MM.

Penyunting:
I Gde Adnyana

Penulis/*Writer*:
Eka Arini Sangkuati

Pengolah Data/*Data Processor*:
I Gde Adnyana
Eka Arini Sangkuati

Gambar Kulit/*Cover Design*:
Ketut Karang Pradnya Dika

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji dan syukur kami panjatkan kehadaan Tuhan Yang Maha Esa publikasi “ Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lombok Utara Menurut Pengeluaran Tahun 2019 – 2023 ” dapat diterbitkan tepat waktu. Publikasi PDRB Menurut Pengeluaran merupakan salah satu publikasi yang dirilis setiap tahun oleh BPS Kabupaten Lombok Utara untuk melengkapi publikasi yang telah ada.

Publikasi PDRB Kabupaten Lombok Utara Menurut Pengeluaran menyajikan informasi terkait dengan struktur penggunaan nilai tambah yang dilakukan oleh institusi atau pelaku ekonomi. Selain itu, PDRB menurut pengeluaran juga memberikan informasi terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi ditinjau dari komponen pengeluaran.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN), maka, sejak tahun 2023, BPS Kabupaten Lombok Utara berkomitmen untuk memajukan jadwal rilis angka PDRB menjadi akhir bulan Februari dan untuk publikasi PDRB Pengeluaran pada akhir bulan April tahun 2023 yang akan ditayangkan di web BPS Kabupaten Lombok Utara. Diharapkan dengan komitmen tersebut, pengguna data dapat memanfaatkan publikasi ini secara luas untuk perencanaan dan evaluasi program ataupun berbagai kegiatan.

Kami menyadari jika publikasi ini masih ada kekurangannya, untuk itu kami berharap masukan dan saran yang membangun untuk meningkatkan kualitas dari publikasi PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Lombok Utara. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan publikasi ini.

Tanjung, April 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

Kabupaten Lombok Utara,



Isa SE., MM.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Grafik	vii
Daftar Lampiran	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Pengertian Pendapatan Regional	2
1.2 Kegunaan Statistik PDRB.....	4
1.3 Perubahan Tahun Dasar PDRB	5
BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA.....	9
2.1. Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	10
2.2. Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT.....	12
2.3. Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah.....	14
2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).....	17
2.5. Perubahan Inventori.....	21
2.6. Ekspor dan Impor	24
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN LOMBOK UTARA TAHUN 2019-2023.....	26
3.1. Tinjauan Agregat PDRB Lombok Utara Menurut Pengeluaran.....	28
3.2. Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	33
3.3. Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT.....	35
3.4. Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah.....	37
3.5. Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	39
3.6. Perkembangan Perubahan Inventori	41
3.7. Perkembangan Ekspor dan Impor Barang dan Jasa	42

BAB IV	PERKEMBANGAN AGREGAT PRDB MENURUT PENGELUARAN	
	KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2019-2023.....	44
4.1.	PDRB (Nominal)	45
4.2.	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).....	47
4.3.	Perbandingan Konsumsi Akhir Terhadap PDRB	48
4.4.	<i>Incremental Capital Output Ratio (ICOR)</i>	49
Penutup		51
Lampiran		53
Daftar Pustaka		60

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019-2023	28
Tabel 3.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019-2023	29
Tabel 3.3 Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019-2023 (persen)	31
Tabel 3.4 Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019-2023(persen)	32
Tabel 3.5 Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Lombok Utara, Tahun 2019-2023.....	33
Tabel 3.6 Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRK Kabupaten Lombok Utara, Tahun 2019-2023	35
Tabel 3.7 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Tahun 2019-2023	37
Tabel 3.8 Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Lombok Utara, Tahun 2019-2023	39
Tabel 3.9 Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Lombok Utara, Tahun 2019-2023.....	41
Tabel 3.10 Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri Kabupaten Lombok Utara, Tahun 2019-2023	43
Tabel 4.1 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Lombok Utara, Tahun 2019-2023	45
Tabel 4.2 Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Tahun 2019-2023	47
Tabel 4.3 Rasio Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Lombok Utara, Tahun 2019-2023	48
Tabel 4.4 <i>Incremental Capital Output Ratio</i> , Kabupaten Lombok Utara, Tahun 2019-2023	50

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Perbandingan PDRB adh Berlaku dan adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019-2023	30
---	----

<https://lombokutarakab.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019-2023.....	54
Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019-2023.....	55
Tabel 3. Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019-2023(persen)	56
Tabel 4. Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019-2023(persen)	57

<https://lombokutarakab.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Data memiliki peranan yang sangat strategis dalam melakukan perencanaan dan evaluasi pembangunan. Penyusunan perencanaan dan program pembangunan sangat tergantung dari ketersediaan data. Untuk itu data menjadi hal yang sangat vital dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Dengan data yang akurat maka sasaran pembangunan juga dapat dirumuskan dengan baik dan memiliki arah yang jelas untuk mencapai tujuan pembangunan.

Salah satu indikator makro yang sangat penting dalam menggambarkan perkembangan perekonomian suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan akumulasi dari keseluruhan kegiatan ekonomi yang terjadi dalam suatu wilayah selama kurun waktu tertentu. PDRB dihitung dengan dua pendekatan harga yaitu menurut harga berlaku dan menurut harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Hal tersebut tidak hanya mencerminkan perkembangan output produksi tapi juga perkembangan harga di tingkat konsumen.

Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

a. Menurut Pendekatan Produksi,

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalan, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi, 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa

Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto.

c. Menurut Pendekatan Pengeluaran, PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

1.2 KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian regional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri.
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts* (SNA) adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables* (SUT) Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- c. Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun¹;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

¹ SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- Konsep dan Cakupan
 - a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). CBR merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
 - b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). MWS merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
 - c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). RnD merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti RnD tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
 - d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). MEE merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
 - e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
 - f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). CSD merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases*, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
 - g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). ELA merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.

h. pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

- Metodologi

Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metoda FISIM (*Financial intermediation services indirectly measured / FISIM*). FISIM dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metoda ini menggantikan metoda *Imputed Bank Services Charge (IBSC)*.

- Valuasi

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- Klasifikasi

Klasifikasi yang digunakan adalah Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor

BAB II

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

ii. Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (United Nations), sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sbb:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);
Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen diluar wilayah atau diluar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut)
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

iv. Penghitungan PKRT Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dan jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Metode penghitungan

Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Susenas. Akan tetapi, karena hasil estimasi data pengeluaran rumah tangga yang berasal dari Susenas cenderung *underestimate* (terutama untuk kelompok bukan makanan dan kelompok makanan jadi), maka perlu dilakukan penyesuaian (*adjustment*). Dalam melakukan *adjustment*, digunakan data sekunder dalam bentuk data atau indikator *suplay* dari berbagai sumber data di luar Susenas. Setelah diperoleh hasil *adjustment*, maka yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan pada data sekunder. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu. Hal ini dilakukan karena hasil penghitungan dari data sekunder dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sbb:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
 - a. Makanan = pengeluaran konsumsi perkapita seminggu $\times (30/7) \times 12 \times$ jumlah penduduk pertengahan tahun
 - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi perkapita sebulan $\times 12 \times$ jumlah penduduk pertengahan tahun
2. Data poin ke 1 dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas yang mungkin dikontrol secara tersendiri;
3. Terhadap data poin ke 3 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu;
4. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-*adjust*;
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. PKRT adh konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumahtangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

Karakteristik unit LNP adalah sbb :

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/ hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, telex, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

1. Sumber data

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SK-LNP).
Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *up-dating* direktori LNPRT.
Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

2. Metode penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sbb :

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenis-nya dihitung dengan rumus sbb :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

$\bar{x}_{ij}$: Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j : jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sbb:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PK-LNPRT adh Berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

i. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lain-nya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang & jasa maupun aktivitas investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sbb:

1. memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di

kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.

2. memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

iii. Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) kabupaten mencakup : a. PK-Pemerintah kecamatan yang berada di wilayah kabupaten; b. PK-Pemerintah kabupaten yang bersangkutan; c. PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah kabupaten; d. PK-Pemerintah Desa/ Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah kabupaten yang bersangkutan.

iv. Penghitungan PDRB Tahunan

1. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P kabupaten Tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu) berdasarkan alokasi dari APBN
- b. Data realisasi APBD Tahunan (Pemda)
- c. Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- d. Output Bank Indonesia (BI)
- e. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

2. Metode Penghitungan

a. PK-P Kabupaten adh Berlaku

Secara umum, PK-P adh Berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut :

PK-P adh Berlaku =

Output non pasar – penjualan barang dan jasa + output Bank
Indonesia

Output **non-pasar** dihitung dengan pendekatan biaya yg dikeluarkan, yaitu : Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yg dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level Kabupaten, PK-P Kabupaten adh Berlaku, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Kabupaten itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten tersebut + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten tersebut + pengeluaran pemerintah Provinsi dan Pusat yang menjadi bagian dari Kabupaten yang bersangkutan.

b. PK-P Kabupaten adh Konstan

Pengeluaran konsumsi pemerintah adh Konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasikan menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

iii Cakupan

PMTB terdiri dari :

Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagai-nya;

Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;

Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya (seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

iv Penghitungan PMTB Tahunan

1. Sumber data

- a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS.
- b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil & Rumah tangga (level provinsi).
- d. Laporan keuangan perusahaan.
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.
- f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum.
- i. Publikasi Statistik Konstruksi.
- j. Data Eksplorasi Mineral dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.
- l. Data industri dari dinas terkait.

3. Metode penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung

berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “*arus komoditas*”. Dalam hal ini penyediaan atau “*supply*” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai adh berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB adh Konstan, maka PMTB adh Berlaku tersebut di “*deflate*” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik adh Berlaku maupun adh Konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB adh Berlaku. Untuk memperoleh nilai adh Konstan adalah dengan men-*deflate* PMTB (adh Berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikan PMTB adh Konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB adh Konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB adh Berlaku, nilai PMTB adh Konstan tersebut di “*reflate*” (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB adh Konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB adh Berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Ke dua*, untuk memperoleh PMTB adh Konstan adalah dengan cara men“deflate” PMTB adh Berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB adh Berlaku untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan adh Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan men-deflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunan-nya.

Untuk perangkat lunak, PMTB adh Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk adh Konstan diperoleh dengan men-deflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan cara mendeflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5 PERUBAHAN INVENTORI

i Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna pertambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau

persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;

- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah :

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalan;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjen Kementan.

2. Metode Penghitungan

Terdapat 2 metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Di lihat dari sisi manfaat-nya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori adh berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sbb :

- menghitung posisi inventori adh Konstan, dengan cara *mendeflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- menghitung perubahan inventori adh Konstan dengan mengurangkan posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- menghitung perubahan inventori adh Berlaku dengan *menginflate* perubahan inventori adh Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori adh Berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori adh Konstan dihitung dengan: a. *mendeflate* nilai perubahan inventori adh Berlaku dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa :

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harga-nya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia;

2.6. EKSPOR IMPOR

i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

Secara umum, aktivitas ekspor-impor kabupaten/kota lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan ekspor-impor nasional ke luar negeri. Faktor yang membuat transaksi ekspor-impor kabupaten/kota ini lebih mudah di antaranya adalah:

- transaksi ekspor dan impor antar kabupaten/kota tidak memerlukan perijinan tertentu dan tidak dikenai tarif impor ataupun pajak ekspor;
- jarak antar daerah relatif lebih dekat; dan
- faktor selera masyarakat relatif sama.

Dilihat dari sisi partner transaksi, ekspor-impor kabupaten/kota dapat dilakukan dengan negara lain (ekspor-impor luar negeri) dan atau kabupaten/kota lain (ekspor-impor antar kabupaten). Dengan kondisi ini membuat transaksi ekspor-impor kabupaten/kota menjadi punya peran yang besar dalam pembentukan PDRB kabupaten/kota. Besarnya peran ekspor-impor kabupaten/kota terhadap PDRB diyakini lebih besar dibandingkan peran ekspor-impor nasional terhadap PDB. Peran ekspor-impor kabupaten/kota juga diyakini punya peran yang relatif besar dibandingkan komponen lain dalam membentuk PDRB kabupaten/kota.

ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

iii Cakupan

Ekspor-Import pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari kabupaten tersebut
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari kabupaten tersebut
Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya
- c. Net Ekspor antar daerah

- Ekspor antar daerah batas wilayah kabupaten
- Impor antar daerah batas wilayah kabupaten

iv Penghitungan Ekspor-Impor Tahunan

1. Sumber data

Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa nasional ke luar negeri, pada penghitungan ekspor-impor barang dan jasa kabupaten/kota belum tersedia data yang sesuai dengan konsep dan definisi SNA. Sumber data yang tersedia hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa kabupaten/kota pada tahun dasar 2010 menjadi sulit dilakukan secara langsung.

Sumber data ekspor-impor untuk tingkat provinsi yang tersedia selama ini di antaranya adalah:

1. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
2. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang; dan
3. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.

Dalam penghitungan ekspor-impor kabupaten/kota, sumber data yang ada akan digunakan sebagai data pendukung hasil penghitungan dengan metode tak-langsung. Sumber data yang digunakan dalam metode tak-langsung adalah :

1. Struktur input;
2. Struktur permintaan akhir menurut komoditas;
3. Nilai tambah bruto ADHB;
4. Koefisien heterogenitas; dan
5. IHPB menurut jenis barang dan IHK jasa-jasa (kesehatan; pendidikan, rekreasi dan olah raga; dan transpor, komunikasi dan jasa keuangan).

1. Metode Penghitungan

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga free on board (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

BAB III

**TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN LOMBOK
UTARA BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN
KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2019 - 2023**

Umumnya pola konsumsi yang dilakukan oleh unit ekonomi di Kabupaten Lombok Utara mengalami perkembangan yang cukup signifikan dan seiring dengan bertambahnya kebutuhan dan kemajuan informasi. Kebutuhan yang terus meningkat akan mendorong unit ekonomi untuk melakukan aktivitas konsumsi. Hal tersebut secara tidak langsung mendorong perputaran laju roda perekonomian di Kabupaten Lombok Utara. Namun demikian pada tahun 2018 aktivitas perekonomian sempat mengalami kelumpuhan akibat diterjang gempa bumi yang menghancurkan sarana prasarana ekonomi yang ada di Lombok Utara dan kemudian di tahun 2019, Kabupaten Lombok Utara mulai bangkit untuk berbenah. Pada tahun 2020 terjadi Pandemi Covid-19 yang menghancurkan sendi-sendi perekonomian di Indonesia secara umum dan di Lombok Utara secara khusus juga terdampak cukup signifikan akibat Pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 pandemi Covid-19 masih melanda meskipun telah terjadi aktivitas ekonomi namun masih terbatas pada aktivitas non pariwisata yang masih mengalami pembatasan secara ketat dengan pemberlakuan PPKM. Pada tahun 2022 seiring pemulihan ekonomi dan perubahan status PPKM serta dibukanya akses masuk ke Indonesia yang dimulai pada bulan maret mengakibatkan wisatawan yang datang ke Lombok Utara utamanya ke tiga Gili meningkat pesat. Hal ini ditandai dengan tingkat hunian hotel meningkat dan usaha wisata kembali dibuka seperti hotel, restoran, angkutan serta penunjang kegiatan wisata tersebut.

Secara umum unit rumah tangga merupakan institusi yang paling besar melakukan konsumsi akhir. Secara tidak langsung hal tersebut mengindikasikan jika permintaan akan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga masih cukup besar. Tingginya permintaan ini juga memicu kegiatan impor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara.

Kontribusi tertinggi penyusun PDRB menurut pengeluaran didominasi oleh konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga memberikan andil hampir sebagian besar dari PDRB Penggunaan. Hal tersebut secara tidak langsung memberikan gambaran jika pendapatan yang diperoleh umumnya lebih banyak digunakan dalam memenuhi kebutuhan untuk konsumsi. Hal tersebut juga didorong oleh semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat Lombok Utara yang baru berkembang dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Nusa Tenggara Barat. Secara rinci pola pengeluaran yang dilakukan oleh masing-masing institusi akan dijelaskan dalam pembahasan selanjutnya.

3.1 TINJAUAN AGREGAT PDRB LOMBOK UTARA MENURUT PENGELUARAN

Perkembangan perekonomian Kabupaten Lombok Utara selama lima tahun terakhir mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Indikasi tersebut terlihat dari nilai agregasi PDRB yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Secara umum besaran PDRB Kabupaten Lombok Utara yang dihitung atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan meningkat cukup signifikan.

Capaian Angka PDRB Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2022 adalah Rp 5,05 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, angka PDRB Kabupaten Lombok Utara tahun 2022 mengalami pertumbuhan, dimana PDRB 2021 adalah Rp 4,72 triliun. Hal ini sejalan dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19. Komponen konsumsi rumah tangga merupakan komponen yang memiliki nilai tertinggi jika dibandingkan dengan komponen lainnya, yaitu mencapai lebih dari Rp 3,87 triliun.

**Tabel 3.1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Utara
Tahun 2019-2023(Miliar Rp)**

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	3.644,14	3.507,03	3.601,67	3.874,27	4.137,58
2. Konsumsi LNPRT	63,73	64,83	66,08	72,88	80,42
3. Konsumsi Pemerintah	1.288,20	1.308,60	1.334,15	1.378,28	1.426,866
4. PMTB	1.921,67	1.790,84	1.899,60	1.993,55	2.265,08
5. Perubahan Inventori	14,48	14,51	14,37	15,84	17,17
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	(2.069,57)	(2.136,71)	(2.209,26)	(2.283,84)	(2.368,33)
Total PDRB	4.862,65	4.549,10	4.715,40	5.050,98	5.558,79

Sumber : BPS Lombok Utara

**Tabel 3.2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Utara
Tahun 2019-2023(Miliar Rp)**

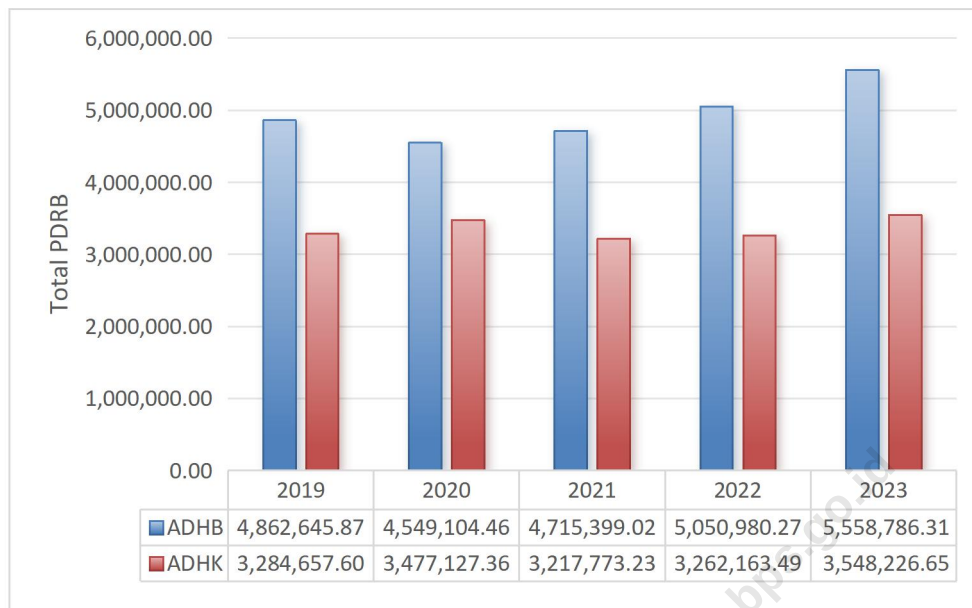
Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	2.695,56	2.582,65	2.623,19	2.722,70	2.831,10
2. Konsumsi LNPRT	44,57	45,02	45,27	47,59	50,54
3. Konsumsi Pemerintah	814,49	821,07	825,07	833,09	846,80
4. PMTB	1.324,67	1.226,54	1.262,33	1.271,91	1.403,77
5. Perubahan Inventori	8,45	8,34	8,08	8,71	8,86
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	(1.410,61)	(1.465,84)	(1.501,77)	(1.507,98)	(1.592,85)
Total PDRB	3.477,13	3.217,77	3.262,16	3.376,02	3.548,22

Sumber : BPS Lombok Utara

Untuk mengetahui perkembangan ekonomi secara riil dengan mengeliminasi pengaruh harga, maka PDRB dihitung atas dasar harga (adh) konstan. Untuk itu perhitungan PDRB adh konstan dianggap bisa mewakili pertumbuhan ekonomi karena pengaruh fluktuasi harga sudah dieliminasi. Saat ini PDRB adh konstan mengacu pada harga di tahun 2010. Dengan menghitung adh konstan 2010 maka pengaruh harga dapat dihilangkan.

Meskipun PDRB konstan pada tahun 2020 sempat mengalami kontraksi akibat hantaman Pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan menghentikan aktivitas ekonomi warga termasuk di Kabupaten Lombok Utara. Pada tahun 2023 PDRB Kabupaten Lombok Utara adh konstan 2010 mencapai Rp 3,55 triliun, mengalami pertumbuhan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp 3,38 triliun. Sejalan dengan pemulihan ekonomi dan dibukanya kembali aktivitas pariwisata di kabupaten Lombok Utara.

Grafik 1. Perbandingan PDRB adh Berlaku dan adh Konstan 2010 Kabupaten Lombok Utara, Tahun 2019-2023 (Rp triliun)



Sumber : BPS Lombok Utara

Secara umum angka PDRB adh konstan dan adh berlaku memperlihatkan tren yang fluktuatif selama lima tahun terakhir. Secara grafis perkembangan PDRB Kabupaten Lombok Utara dapat dilihat dari Grafik 1. Berdasarkan grafik 1 terlihat jika perkembangan PDRB adh berlaku meningkat lebih cepat jika dibandingkan dengan adh konstan, hal tersebut karena dipengaruhi oleh kenaikan harga. PDRB adh berlaku meningkat lebih tajam jika dibandingkan dengan adh konstan dari tahun ke tahun. Semakin besar gap antara PDRB adh berlaku dan adh konstan menunjukkan jika semakin besar pengaruh kenaikan harga terhadap kenaikan PDRB di Kabupaten Lombok Utara.

**Tabel 3.3. Distribusi PDRB ADHB
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Utara
Tahun 2019-2023 (persen)**

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	74,94	77,09	76,38	76,70	74,43
2. Konsumsi LNPRT	1,31	1,43	1,40	1,44	1,45
3. Konsumsi Pemerintah	26,49	28,77	28,29	27,29	25,67
4. PMTB	39,52	39,37	40,28	39,47	40,75
5. Perubahan Inventori	0,30	0,32	0,30	0,31	0,31
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	(42,56)	(46,97)	(46,67)	(45,22)	(42,61)
Total PDRB	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : BPS Lombok Utara

Jika kita lihat dari sharing komponen PDRB menurut pengeluaran Kabupaten Lombok Utara mengalami sedikit pergeseran dari tahun ke tahun. Komponen yang memberikan sharing tertinggi disumbangkan oleh komponen konsumsi rumah tangga. Kontribusi konsumsi rumah tangga pada tahun 2023 mencapai 74,43 persen, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 76,70 persen.

Komponen lainnya yang memberikan kontribusi cukup tinggi adalah komponen impor yang dilihat dari net ekspor barang dan jasa yang nilainya cukup besar dan bertanda negatif. Hal tersebut dapat dimaklumi mengingat masih besarnya ketergantungan barang – barang impor untuk memenuhi kebutuhan di Kabupaten Lombok Utara. Impor merupakan komponen pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran Kabupaten Lombok Utara. Pada tahun 2023 net ekspor barang dan jasa sebesar -42,61 persen, mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar -45,22 persen.

**Tabel 3.4. Pertumbuhan PDRB ADHK 2010
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Utara
Tahun 2019-2023 (persen)**

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	2,93	(4,19)	1,57	3,79	3,98
2. Konsumsi LNPRT	2,05	1,01	0,56	5,12	6,20
3. Konsumsi Pemerintah	2,96	0,81	0,49	0,97	1,65
4. PMTB	15,79	(7,41)	2,92	0,76	10,37
Total PDRB	5,86	(7,46)	1,38	3,49	5,10

Sumber : BPS Lombok Utara

Selama lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lombok Utara menunjukkan tren fluktuatif akibat diterpa bencana. Pada tahun 2019 Kabupaten Lombok Utara sempat memulai pemulihan pasca terjadi bencana gempa bumi setahun sebelumnya, tetapi pada tahun 2020 diterpa kembali oleh datangnya bencana pandemi Covid19. Pada tahun setelahnya, Kabupaten Lombok Utara memulai masa pemulihan pasca pandemic Covid19 yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi mulai meningkat.

Pada tahun 2023, seluruh komponen PDRB Pengeluaran tumbuh positif. Hal ini merupakan dampak dari pemulihan ekonomi pasca pandemic covid19 sehingga daya beli masyarakat meningkat serta program pembangunan yang sudah dilaksanakan pada tahun tersebut. Pertumbuhan tertinggi dicapai pada komponen PMTB sebesar 10,37 persen dan diikuti oleh komponen LNPRT.

3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Tabel 3.5. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Lombok Utara, Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Miliar Rp)	3.644,14	3.507,03	3.601,66	3.874,26	4.137,58
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	2.695,56	2.582,65	2.623,19	2.722,70	2.831,10
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	74,94	77,09	76,38	76,70	74,43
Pertumbuhan²	2,93	(4,19)	1,57	3,79	3,98
Konsumsi Perkapita (Juta Rp)	16,53	14,18	14,32	15,11	15,58
Jumlah penduduk (Ribuan Jiwa)	220,41	247,40	251,45	256,44	265,5

Sumber : BPS Lombok Utara

Komponen konsumsi rumah tangga merupakan komponen yang memiliki pengaruh yang paling besar terhadap capaian PDRB pengeluaran. Hal tersebut tercermin dari besarnya kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Lombok Utara.

Konsumsi rumah tangga pada tahun 2023 mencapai Rp 4,14 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, konsumsi rumah tangga meningkat yaitu pada tahun 2022 sebesar 3,87 triliun. Senada dengan ADH berlaku, komponen pengeluaran ADH konstan 2010 juga meningkat dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2020. Pada tahun 2023 konsumsi rumah tangga kembali meningkat menjadi Rp 2,83 triliun, jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp 2,72 triliun. Hal ini merupakan dampak dari pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan Indonesia, termasuk juga Kabupaten Lombok Utara.

Tingginya *share* komponen konsumsi rumah tangga secara tidak langsung memberikan indikasi jika masih tingginya prioritas terhadap pengeluaran rumah tangga jika dibandingkan dengan pengeluaran lainnya. Pada tahun 2023 kontribusi komponen konsumsi rumah tangga mencapai 74,43 persen mengalami sedikit penurunan *share* jika dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 76,70 persen. Umumnya masyarakat yang maju memiliki kontribusi komponen

² Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

pengeluaran rumah tangga yang rendah jika dibandingkan dengan masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi yang baru mulai berkembang. Mengingat Kabupaten Lombok Utara merupakan kabupaten yang sedang berkembang dengan tingkat perkembangan ekonomi yang masih tinggi, maka *share* komponen konsumsi rumah tangga ini mencerminkan pola konsumsi masyarakat yang masih tinggi.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir pertumbuhan komponen konsumsi rumah tangga di Kabupaten Lombok Utara fluktuatif. Peningkatan komponen konsumsi rumah tangga didukung oleh penambahan jumlah penduduk dan peningkatan konsumsi rumah tangga secara umum. Peningkatan tersebut kemungkinan juga disebabkan semakin meningkatnya variasi barang kebutuhan rumah tangga. Laju pertumbuhan komponen konsumsi rumah tangga pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 3,98 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022 sebesar 3,79.

Konsumsi perkapita mencerminkan besaran nilai komponen konsumsi rumah tangga dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Pada tahun 2023 pengeluaran perkapita penduduk Kabupaten Lombok Utara mencapai Rp 15,58 juta, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai Rp 15,11 juta. Hal tersebut bisa diyakini mengingat daya beli masyarakat yang cukup tinggi pasca pemulihan ekonomi akibat pandemic covid-19 yang melanda Indonesia khususnya di Kabupaten Lombok Utara.

3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Konsumsi LNPRT mencakup konsumsi yang dilakukan oleh lembaga non profit seperti LSM, partai politik, yayasan dan perkumpulan yang tidak mencari keuntungan. Komponen konsumsi LNPRT masih sangat rendah di Kabupaten Lombok Utara. Walaupun tidak berdampak signifikan terhadap pembentukan PDRB menurut pengeluaran namun konsumsi lembaga non profit memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Tercatat selama lima tahun terakhir komponen konsumsi LNPRT berkisar di atas Rp 30 miliar sampai dengan Rp 60 miliar.

**Tabel 3.6. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT
Kabupaten Lombok Utara, Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Miliar Rp)	63,73	64,83	66,08	72,88	80,42
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	44,57	45,02	45,27	47,59	50,54
Proporsi terhadap PDRB (%)	1,31	1,43	1,40	1,44	1,45
Laju (%)	2,05	1,01	0,56	5,12	6,20

Sumber : BPS Lombok Utara

Dalam kurun waktu lima tahun perkembangan aktivitas LNPRT mengalami peningkatan yang cukup baik. Pada tahun 2022 kontribusi pengeluaran LNPRT mencapai 1,45 persen. Laju pertumbuhan konsumsi LNPRT selama lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Pada tahun 2019, pasca bencana gempa, pengeluaran LNPRT masih tumbuh positif namun mengalami perlambatan hingga mencapai angka pertumbuhan sebesar 2,05 persen. Sedangkan pada tahun 2020 meskipun sudah ditunjang dengan adanya kegiatan Pilkada laju hanya mencapai 1,01 persen akibat adanya pandemic covid-19 sehingga ada pembatasan kegiatan berkerumun dan berkumpul. Pada tahun 2022 laju mengalami pertumbuhan cukup besar mengingat perbaikan ekonomi dan kembali dibukanya keses kegiatan masyarakat sehingga aktivitas LNPRT meningkat menjadi 5,12. Laju pertumbuhan komponen pengeluaran LNPRT juga meningkat di tahun 2023 seiring adanya pemulihan pasca pandemi Covid-19, kegiatan lembaga-lembaga mulai aktif kembali dilaksanakan secara tatap muka, ditambah adanya persiapan menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024 yang persiapannya sudah dimulai sejak tahun 2023, seperti pendaftaran partai politik, serta pelaksanaan kampanye pemilihan presiden dan pemilihan umum legislatif.

3.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Komponen konsumsi pemerintah memberikan pengaruh yang cukup signifikan terutama terhadap daerah yang masih berkembang seperti Kabupaten Lombok Utara. pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah sebagian besar akan menjadi komponen pengeluaran yang dilakukan pemerintah dalam PDRB menurut pengeluaran dan sebagian lainnya akan menjadi konsumsi masing masing komponen lainnya seperti rumah tangga dan PMTB.

Tabel 3.7. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Miliar Rp)	1.288,20	1.308,60	1.334,15	1.378,28	1.426,87
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	814,49	821,07	825,07	833,09	846,80
Proporsi terhadap PDRB (%)	26,49	28,77	28,29	27,29	25,67
Laju (%)	2,96	0,81	0,49	0,97	1,65

Sumber : BPS Lombok Utara

Selama lima tahun terakhir perkembangan konsumsi pemerintah di Kabupaten Lombok Utara meningkat cukup signifikan. Pada tahun 2023 konsumsi pemerintah mencapai Rp 1,43 triliun, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp 1,38 triliun. Hal tersebut secara tidak langsung mencerminkan adanya peningkatan pelayanan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Sejalan dengan ADH Berlaku, komponen pengeluaran pemerintah ADH Konstan juga menunjukkan peningkatan. Besaran komponen konsumsi pemerintah ADH Konstan pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp 846,80 miliar yaitu mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar Rp 833,09 miliar.

Kontribusi pemerintah pada PDRB pengeluaran dapat dilihat dari proporsi konsumsi pemerintah terhadap PDRB. Pada tahun 2023 kontribusi pemerintah sebesar 25,67. Mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 27,29.

Laju pertumbuhan konsumsi pemerintah selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2023 laju pertumbuhan konsumsi pemerintah sebesar 1,65 persen meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 0,97 persen.

3.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Investasi merupakan salah satu komponen yang memegang peranan yang cukup strategis dalam perekonomian. Perkembangan investasi yang terjadi di suatu daerah dapat dilihat dari perkembangan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Komponen PMTB dalam PDRB menurut pengeluaran menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)³. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha.

**Tabel 3.8. Perkembangan dan Struktur PMTB
Kabupaten Lombok Utara, Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB (Miliar Rp)					
a. ADHB	1.921,67	1.790,84	1.899,59	1.993,53	2.265,08
b. ADHK	1.324,67	1.226,54	1.262,33	1.271,91	1.403,77
Proporsi Terhadap PDRB (%)	39,52	39,37	40,28	39,47	40,75
Laju Pertumbuhan (%)	15,79	(7,41)	2,92	0,76	10,37

Sumber : BPS Lombok Utara

Selama lima tahun terakhir, komponen PMTB menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal tersebut tercermin dari semakin meningkatnya nilai PMTB dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 besaran komponen PMTB yaitu sebesar Rp 2,27 triliun mengalami perkembangan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp 1,99 triliun.

Share komponen PMTB terhadap PDRB pengeluaran cukup besar. Selama lima tahun terakhir kontribusi PMTB selalu di atas 35 persen. Kontribusi PMTB pada tahun 2023 mencapai 40,75 persen, mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 39,47 persen. Besarnya kontribusi PMTB diharapkan bisa menjadi motor penggerak perekonomian di Kabupaten Lombok Utara.

Adanya peningkatan investasi di Kabupaten Lombok Utara diindikasikan dengan laju pertumbuhan komponen PMTB. Laju pertumbuhan PMTB selama lima tahun terakhir sangat fluktuatif akibat gempa dan pandemic serta pemulihan ekonomi pasca gempa dan pandemic. Meskipun pada tahun 2020 laju pertumbuhan PMTB bernilai negatif yang cukup dalam, akibat

³ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor
PDRB Kabupaten Lombok Utara Menurut Pengeluaran Tahun 2019 - 2023

pandemic dan pada tahun 2022 laju PMTB berada pada level 0,76, tetapi dapat kembali naik pada tahun 2023 menjadi 10,37. Hal ini Karena pada tahun 2023 pasca pemulihan ekonomi yang dikejar pertumbuhan dari konsumsi rumah tangga, adanya Proyek Strategis Nasional yang mulai dilaksanakan seperti pembangunan jalan serta infrastruktur lainnya, seperti hotel dan pelabuhan.

<https://lombokutarakab.bps.go.id>

3.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

**Tabel 3.9. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
Kabupaten Lombok Utara, Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori (miliar Rp)					
a. ADHB	14,48	14,51	14,37	15,84	17,17
b. ADHK	8,45	8,34	8,08	8,71	8,87
Proporsi Terhadap PDRB (%)	0,30	0,32	0,30	0,31	0,31

Sumber : BPS Lombok Utara

Perkembangan perubahan inventori kurun waktu lima tahun cukup berfluktuatif. Pada tahun 2023 nilai komponen inventori mencapai Rp 17,17 miliar, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp 15,84 miliar. Begitupun ADH konstan 2010 fluktuasi masih ada pada komponen inventori. Jika ditinjau komposisi terhadap PDRB pengeluaran, memang perubahan inventori memiliki kontribusi yang tidak begitu besar yaitu berkisar kurang dari 2 persen. Kontribusi perubahan inventori tahun 2023 hanya mencapai 0,31 persen dari total PDRB Pengeluaran Kabupaten Lombok Utara, angka tersebut masih sama seperti tahun 2022.

3.7 PERKEMBANGAN EKSPOR DAN IMPOR BARANG DAN JASA

Lalu lintas perdagangan antar daerah akan mendorong adanya aktivitas ekspor impor. Komoditas ekspor produk unggulan di Kabupaten Lombok Utara meliputi hasil pertanian utamanya perkebunan. Selain itu adanya aktivitas pariwisata secara tidak langsung memacu ekspor baik untuk warga asing/ luar negeri. Ekspor menggambarkan besaran barang dan jasa yang dipasarkan keluar daerah dalam hal ini adalah ke luar Kabupaten Lombok Utara baik antar kabupaten kota, provinsi dan luar negeri. Ekspor yang dikirim ke luar negeri di Lombok Utara terkait dengan kunjungan wisatawan asing yang berlibur di Kabupaten Lombok Utara. Kabupaten Lombok Utara terkenal dengan destinasi wisatawan yang sering dikunjungi oleh wisatawan terutama wisatawan luar negeri.

Sementara itu, kebutuhan barang dan jasa yang tidak bisa diproduksi di wilayah Kabupaten Lombok Utara akan menjadi komoditas impor. Komponen impor merupakan komponen pengurang dalam PDRB pengeluaran. Hal tersebut dikarenakan komponen impor merupakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh pihak luar. Dengan kata lain barang dan jasa yang dikonsumsi merupakan produksi dari unit produksi yang berasal dari luar daerah atau luar negeri. Barang yang diimpor dari luar negeri seperti mesin mesin dan peralatan yang didatangkan dari luar negeri. Jasa yang diimpor berupa jasa tenaga kerja yang berasal dari tenaga kerja asing.

Dalam penghitungannya yang ditampilkan dalam PDRB Pengeluaran adalah net ekspor barang dan jasa yang artinya jika bernilai positif maka nilai ekspor baik antar kabupaten, provinsi maupun luar negeri lebih tinggi daripada impor. Begitu juga sebaliknya jika bernilai negatif maka nilai impor lebih besar dari nilai ekspornya.

**Tabel 3.10. Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa
Kabupaten Lombok Utara, Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Net Ekspor Barang dan Jasa (Miliar Rp)					
a. ADHB	(2.069,57)	(2.136,71)	(2.200,46)	(2.283,82)	(2.368,33)
b. ADHK	(1.410,61)	(1.465,84)	(1.501,77)	(1.507,98)	(1.592,85)
Proporsi Terhadap PDRB (%)	(42,56)	(46,97)	(46,67)	(45,22)	(42,61)

Sumber : BPS Lombok Utara

Net ekspor barang dan jasa tahun 2023 adalah sebesar *minus* Rp 2,36 triliun, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai *minus* Rp 2,28 triliun. Hal yang sama juga terjadi jika komponen net ekspor barang dan jasa dihitung ADH konstan 2010. Besaran komponen net ekspor barang dan jasa adh konstan 2010 pada tahun 2023 adalah sebesar *minus* Rp 1.60 triliun naik dari tahun 2022 yang sebesar *minus* Rp 1.51 triliun.

Secara rata - rata kontribusi net ekspor diatas -40 persen. Tercatat pada tahun 2023 kontribusi net ekspor yaitu mencapai -42,61 persen, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai -45,22 persen. Kontribusi yang besar ini sangat tergantung dari banyaknya barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat di Kabupaten Lombok Utara yang didatangkan dari luar daerah. Masih tingginya angka impor Lombok Utara mengindikasikan jika perlunya meningkatkan kapasitas produksi dan variasi produksi dari unit-unit produksi di Lombok Utara serta industrialisasi hasil pertanian sehingga mampu meningkatkan ekspor dalam bentuk barang jadi atau setengah jadi dan bukan bahan baku industri.

BAB IV

**PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT
PENGELUARAN KABUPATEN LOMBOK UTARA
TAHUN 2019-2023**

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, maka disajikan data PDRB perkapita.

**Tabel 4.1. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita
Kabupaten Lombok Utara, Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai PDRB (Miliar Rp)					
a. ADHB	4.862,65	4.549,10	4.715,40	5.050,98	5.5558,79
b. ADHK	3.477,13	3.217,77	3.262,16	3.376,02	3.548,23
PDRB Perkapita					
a. ADHB (Juta Rp)	22,06	18,39	18,75	19,70	20,94
b. ADHK (Juta Rp)	15,78	13,01	12,97	13,17	13,36
c. Pertumbuhan (%)	5,86	(7,46)	1,38	3,49	5,10
Jumlah Penduduk (Ribuan jiwa)	220,41	247,40	251,45	256,44	265,50

Sumber : BPS Lombok Utara

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui potensi besaran PDRB yang bisa dinikmati oleh masing-masing orang dalam suatu wilayah adalah PDRB Perkapita. PDRB Perkapita dihitung dengan membagi total PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Walaupun sifatnya sangat kasar namun kerap digunakan untuk mengetahui potensi ekonomi yang bisa dinikmati oleh penduduk dalam suatu wilayah. Untuk itu indikator PDRB Perkapita mempunyai peranan yang cukup strategis dalam mengkaji keberhasilan pembangunan dan evaluasi program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Lombok Utara mengalami perkembangan yang terus meningkat. Pada tahun 2023 PDRB perkapita mencapai Rp 20,94 juta, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp 19,70 juta. Jika dinilai adh konstan maka PDRB Perkapita juga menunjukan peningkatan riil dari PDRB perkapita. Pada tahun 2023 PDRB Perkapita adh Konstan sebesar 13,36 Juta meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 13,17 Juta rupiah. Laju pertumbuhan PDRB perkapita tahun 2023 sebesar 5,10 meningkat dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 3,49.

<https://lombokutarakab.bps.go.id>

4.2 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Sekilas nampak bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di Kabupaten Lombok Utara digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Sebagai kabupaten yang masih berkembang, investasi fisik memiliki peranan dalam meningkatkan produktivitas dari seluruh unit ekonomi yang ada di Kabupaten Lombok Utara.

**Tabel 4.2. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB
Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	3.644,14	3.507,03	3.601,67	3.874,27	4.137,58
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	1.921,67	1.790,84	1.899,59	1.993,53	2.265,08
Perbandingan Konsumsi RT thd PMTB	1,90	1,96	1,90	1,94	1,83

Sumber : BPS Lombok Utara

Selama lima tahun terakhir, rasio penggunaan konsumsi RT jika dibandingkan dengan PMTB sekitar 2 kali lipat dan cenderung menurun. Kecenderungan tersebut mengindikasikan jika terjadi peningkatan penggunaan akhir yang lebih besar pada komponen PMTB dibandingkan pada konsumsi RT.

4.3 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

**Tabel 4.3. Rasio Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB
Kabupaten Lombok Utara, Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar Rp)					
a. Rumah tangga	3.644,14	3.507,03	3.601,67	3.874,27	4.137,58
b. LNPRT	63,73	64,83	66,08	72,88	80,42
c. Pemerintah	1.288,20	1.308,60	1.334,15	1.378,28	1.426,87
J u m l a h	4.996,07	4.880,46	5.001,89	5.325,43	5.644,87
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	4.862,65	4.549,10	4.715,40	5.050,98	5.558,79
Rasio	1,03	1,07	1,06	1,05	1,02

Sumber : BPS Lombok Utara

Jika dibandingkan antara konsumsi akhir dengan total PDRB maka terlihat jika rasio konsumsi akhir terhadap PDRB mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 rasio konsumsi akhir menurun hingga menjadi 1,02 kali lipat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan PDRB tidak hanya dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi akhir.

4.4 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

**Tabel 4.4. Incremental Capital Output Ratio,
Kabupaten Lombok Utara, Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010)	3.477,13	3.217,77	3.262,16	3.376,02	3.548,23
(Miliar Rp)					
Perubahan	192.469,75	(259.354,13)	44.390,26	113.861,22	172.201,95
(MiliarRp)					
PMTB (ADHK 2010)	1.324,67	1.226,54	1.262,33	1.271,91	1.403,77
(MiliarRp)					
ICOR	6,88	-4,73	28,44	11,17	8,15

Sumber : BPS Lombok Utara

Berdasarkan tabel di atas maka terlihat jika ICOR secara umum selama lima tahun terakhir sangat fluktuatif. Pada tahun 2023 nilai ICOR Kabupaten Lombok Utara sebesar 8,15, turun dibandingkan tahun 2022 sebesar 11,17.

<https://lombokutarakab.bps.go.id>

<https://lombokutarakab.bps.go.id>

BAB V

PENUTUP

1. Series data yang disajikan adalah lima tahun terakhir yaitu meliputi tahun 2019 s.d 2023, dengan mencantumkan series data lima tahun diharapkan dapat memberikan perubahan tentang adanya perubahan dalam kurun waktu lima tahun. Tahun 2019-2021 merupakan angka tetap, sedangkan tahun 2022 merupakan angka sementara dan tahun 2023 merupakan angka sangat sementara sehingga nanti di tahun berikutnya dapat diperbaiki.
2. PDRB menurut pengeluaran menggambarkan pola konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Dalam pembahasannya juga dilengkapi dengan data penunjang seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri, sehingga diharapkan mampu memberikan informasi yang menyeluruh dan mudah dimengerti
3. PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
4. Berdasarkan publikasi PDRB Pengeluaran diharapkan dapat diturunkan indikator pelengkap seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia.

<https://lombokutarakab.bps.go.id>

LAMPIRAN

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019-2023

Kategori	PDRB ADHB (Miliar Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3.644,14	3.507,03	3.601,67	3.874,27	4.137,58
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	63,73	64,83	66,08	72,88	80,42
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.288,20	1.308,60	1.334,15	1.378,28	1.426,86 6
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.921,67	1.790,84	1.899,59	1.993,53	2.265,08
5. Perubahan Inventori	14,48	14,51	14,37	15,84	17,17
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	(2.069,57)	(2.136,71)	(2.200,46)	(2.283,82)	(2.368,33)
PDRBe	4.862,65	4.549,10	4.715,40	5.050,98	5.558,79

**Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut
Pengeluaran,
Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019-2023**

Kategori	PDRB ADHK (<i>Miliar Rupiah</i>)				
	2019	2020	2021	2022	2023
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2.695,56	2.582,65	2.623,19	2.722,70	2.831,10
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	44,57	45,02	45,27	47,59	50,54
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	814,49	821,07	825,07	833,09	846,80
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.324,67	1.226,54	1.262,33	1.271,91	1.403,77
5. Perubahan Inventori	8,45	8,34	8,08	8,71	8,86
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	(1.410,61)	(1.465,84)	(1.501,77)	(1.507,98)	(1.592,85)
PDRBe	3.477,13	3.217,77	3.262,16	3.376,02	3.548,22

Tabel 3. Distribusi Presentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019-2023

Kategori	Distribusi PDRB ADHB (<i>Persen</i>)				
	2019	2020	2021	2022	2023
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	74,94	77,09	76,38	76,70	74,43
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,31	1,43	1,40	1,44	1,45
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	26,49	28,77	28,29	27,29	25,67
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	39,52	39,37	40,28	39,47	40,75
5. Perubahan Inventori	0,30	0,32	0,30	0,31	0,31
6. Net Ekspor	(42,56)	(46,97)	(46,67)	(45,22)	(42,61)
PDRBe	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Tabel 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019-2023

Kategori	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2,93	(4,19)	1,57	3,79	3,98
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,05	1,01	0,56	5,12	6,20
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,96	0,81	0,49	0,97	1,65
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	15,79	(7,41)	2,92	0,76	10,37
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRBe	5,86	(7,46)	1,38	3,49	5,10

<https://lombokutarakab.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. _____, *Incremental Capital Output Ratio Sektor Industri, 1980-1990*, Jakarta.
3. _____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
4. _____, *Statistik Industri, berbagai seri*, Jakarta.
5. _____, *Statistik Listrik, Gas dan Air*, berbagai seri, Jakarta.
6. _____, *Statistik Pertambangan Migas*, berbagai seri, Jakarta.
7. _____, *Statistik Pertambangan Non Migas*, berbagai seri, Jakarta.
8. _____, *Statistik Konstruksi*, berbagai seri, Jakarta.
9. _____, *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
12. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
13. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.
14. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
15. United Nations, *A System of National Accounts*, Studies in Methods, Series F No.2 Rev.3, New York, 1968.
16. _____, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
17. _____, *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.

18. _____, *Handbook of National Accounting, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No. 50*, New York, 1988.
19. _____, *Link between Business Accounting and National Accounting, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No. 76*, New York, 2000.
20. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
21. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.
22. World Bank, *System of National Accounts 1993*, Bahan Kursus, Washington DC, 1993

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

Jalan Raya Gangga-Bayan, Gangga, Lombok Utara

Homepage : <http://lombokutarakab.bps.go.id>

Email : bps5208@bps.go.id